

## Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Mengenai Penggelapan Pajak

Cecilia Engko<sup>1</sup>  
Tirsa O. Lenggono<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan manajemen mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa fakultas ekonomi universitas Pattimura, dengan metode penentuan sampling yaitu purposive sampling. Responden dipilih dari mahasiswa jurusan akuntansi dan manajemen semester 5 yang telah mengambil mata kuliah hukum pajak dan perpajakan sebanyak 100 orang. Adapun metode pengumpulan data adalah melalui penyebaran kuesioner. Hasil yang diperoleh menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan manajemen tentang penggelapan pajak. Baik mahasiswa akuntansi maupun mahasiswa manajemen sama-sama menganggap bahwa penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

**Kata Kunci:** Persepsi, Penggelapan pajak

### Abstract

*This study aims to examine whether there are differences in perceptions between accounting and managements students regarding tax evasion. This study was conducted students on Economis and bussines of Pattimura University, using the method of determining the samplingthat is purposive sampling. Respondent selected from students majring in accounting and management in semester 5 who taken tax and tax law courses as many as 100 people. As for the data collection method is through distributing questionnaires. The results obtained indicate that there is no difference in perceptions between accounting and management students about tax evasion. Both Accounting and management students think that tax evasion is an unethical act to do.*

**Keywords:** perceptions, tax evasion

---

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, email : [rombotceilia@gmail.com](mailto:rombotceilia@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, email : [tirza.lenggono84@yahoo.com](mailto:tirza.lenggono84@yahoo.com)

## PENDAHULUAN

Topik penggelapan pajak merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan apalagi sejak adanya kasus Gayus yang sangat menghebohkan dunia perpajakan. Penggelapan pajak bisa timbul akibat pengelolaan pajak yang kurang baik. Begitu juga dengan Target penerimaan negara terlalu besar akan mengakibatkan beban pencapaian target yang diemban petugas pajak menjadi beban psikologis sehingga dikhawatirkan dapat memicu tindakan yang menyimpang. Target penerimaan negara yang tinggi memicu banyaknya manipulasi dalam pembayaran pajak terutama oleh para satuan kerja di pemerintahan sehingga membuat penerimaan pajak tidak maksimal. Praktik penggelapan pajak di Indonesia diyakini menjadi salah satu faktor yang membuat tidak tercapainya target pendapatan negara di sektor pajak beberapa tahun terakhir ini. Tahun 2013 penerimaan negara dari sektor pajak meleset 1.071 triliun rupiah atau hanya mencapai 93.41% dari

target (www.liputan6.com). Andin Hadiyanto, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan juga menambahkan bahwa Ditjen Pajak akan mengalami kesulitan menutupi deviasi sekitar lima persen atau sebesar 1.110,2 triliun rupiah dari target pajak tahun 2014. (Tempo, 9 April 2014). Mughal (2012) menyatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat digambarkan sebagai kegiatan wajib pajak di mana mereka tidak patuh dan secara sengaja melakukan pelanggaran hukum atau melanggar undang-undang pajak dengan tujuan melarikan diri dari pembayaran pajak yang telah menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

Hal yang melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), bahkan rata-rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan (Ika, 2012).

Penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya. Oknum petugas pajak secara sengaja memanfaatkan celah-celah dari kelemahan undang-undang perpajakan atau peraturan pajak yang ada untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan oknum petugas pajak yang mengecewakan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme akuntan menurun.

Hubungan antara tingkat pendidikan dan penggelapan pajak (*tax evasion*) masih belum jelas. Berbeda dengan penelitian tentang hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan pajak yang telah banyak dilakukan sebelumnya. Wallschutzky (1984), dalam Ross dan McGee, (2012) menemukan hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan pajak, yang berarti bahwa jika tingkat pendidikan seseorang meningkat, maka tingkat kepatuhan juga akan meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Groenland & van Veldhoven (1983, dalam Ross dan McGee, 2012) menyatakan meningkatnya pendidikan akan menurunkan tingkat kepatuhan seseorang terhadap pajak.

McGee, et. al., (2008) meneliti penggelapan pajak (*tax evasion*) melalui persepsi dari dua budaya yang berbeda, yaitu pada mahasiswa bisnis di Hong Kong dan Amerika Serikat. Baik mahasiswa di Hong Kong maupun Amerika Serikat menentang pandangan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah etis/dibenarkan. Terkadang penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang etis tergantung pada keadaan. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah atas dasar moral yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak, adanya korupsi oleh pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak. Penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa di Amerika Serikat lebih menentang penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan mahasiswa di Hong Kong.

Musaibah, et. al., (2012) meneliti perbedaan mahasiswa dengan latar belakang pendidikan akuntansi, bisnis, dan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada

perbedaan yang signifikan untuk salah satu dari 18 pertanyaan yang diajukan. Hasil dari studi menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah etis dalam kondisi tertentu. Mayoritas responden menentang pandangan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) selalu atau hampir selalu etis. Responden membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai praktek etis jika sistem pajak tidak adil, pemerintah korup, boros, atau jika pemerintah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Argumen paling lemah adalah dalam kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) saat ini dilihat dari perspektif Islam. Sebagai Muslim, penggelapan pajak (*tax evasion*) tidak dapat dibenarkan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Reskino, Rini dan Dinda (2013) yang meneliti tentang persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak pada beberapa universitas yang ada di Jakarta. Sampel yang diambil Reskino, Rini dan Dinda (2013) yaitu pada mahasiswa akuntansi program S1 semester lima keatas yang telah mengambil mata kuliah perpajakan dan hukum pajak dan mahasiswa akuntansi program S2 (Magister Akuntansi) tidak ada batasan semester. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 mengenai penggelapan pajak. Namun mahasiswa akuntansi program S1 lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi Program S2, walaupun perbedaan tersebut tidak signifikan.

Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian Reskino, Rini dan Dinda (2013) yakni sampel yang digunakan bukan hanya pada mahasiswa akuntansi namun juga pada mahasiswa manajemen yang sedang menempuh mata kuliah perpajakan. Adapun alasan yang digunakan peneliti untuk menggunakan mahasiswa manajemen sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa baik mahasiswa akuntansi maupun manajemen yang telah mengambil mata kuliah perpajakan paling tidak kedua jurusan tersebut sama-sama telah mengetahui peraturan perpajakan. Sehingga rumusan masalah: Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan manajemen mengenai penggelapan pajak?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji beda persepsi mahasiswa akuntansi dan manajemen mengenai penggelapan pajak.

Persepsi memiliki beberapa definisi. Siegel dan Marconi (1989) mengartikan persepsi sebagai keadaan bagaimana seseorang menginterpretasikan kejadian, objek, dan orang. Seseorang akan bertindak dengan dasar persepsi mereka tanpa memperhatikan apakah persepsi tersebut tepat atau tidak tepat mencerminkan realita yang ada. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia (Lubis, 2010). Jadi, persepsi adalah keadaan dimana seorang individu dapat menginterpretasikan sesuatu berdasarkan ransangan yang diterima oleh stimulus setiap individu dengan dipengaruhi juga oleh pengalaman pengalaman masa lalu. Persepsi yang dihasilkan oleh seorang individu bersifat subjektif dan situasional. Hal ini dikarenakan persepsi tentang suatu objek bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu. Sehingga suatu persepsi terbentuk bukan dikarenakan jenis atau bentuk stimulunya, tetapi karakter dari orang yang menerima stimuli tersebut.

Menurut Andercon, penghindaran pajak adalah cara rnengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan,

terutama melalui perencanaan Pajak. Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak (*tax evasion*) ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Mardiasmo, 2009). Sedangkan penghindaran pajak termasuk dalam pengertian perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan sebaliknya diperoleh penghematan (*tax saving*) dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan illegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut. Hal serupa dinyatakan oleh Kirchler, et. al. (2001), dalam penelitiannya, bahwa meskipun ada kesamaan antara penggelapan pajak (*tax evasion*), dan penggelapan pajak (*tax avoidance*) dalam mengurangi pendapatan, namun penggelapan pajak (*tax evasion*) dianggap negatif/ilegal dan tidak bermoral, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap lebih positif dan bermoral terkait dengan niat untuk menghemat pajak dengan tata cara yang benar.

Menurut Danandjaja (2003), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas social maupun gender. Diskriminasi dalam bidang perpajakan menunjuk pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak. Semakin kecil diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, namun jika diskriminasi semakin besar maka perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai perilaku yang etis.

Penelitian Reskino, Rini dan Dinda (2013) yang meneliti tentang persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak pada beberapa universitas yang ada di Jakarta. Sampel yang diambil Reskino, Rini dan Dinda (2013) yaitu pada mahasiswa akuntansi program S1 semester lima keatas yang telah mengambil mata kuliah perpajakan dan hukum pajak dan mahasiswa akuntansi program S2 (Magister Akuntansi) tidak ada batasan semester. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 mengenai penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian McGee et. al., (2008) tentang persepsi etis mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada mahasiswa bisnis di Hong Kong dan Amerika Serikat. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa di Hong Kong dan Amerika Serikat. Mahasiswa di Amerika Serikat lebih memperhatikan nilai-nilai moral

terlepas dari apa yang orang lain kerjakan, mereka menganggap penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tidak etis sekalipun pemerintah tidak menggunakan dana pajak dengan baik. Berbeda dengan mahasiswa di Hong Kong, mereka cenderung membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) jika apa yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Musaibah, et. al., (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa akuntansi, administrasi bisnis, dan keuangan di Yaman mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Berbeda dengan penelitian Smith dan McGee (2006) yang menyatakan bahwa mahasiswa bisnis lebih menentang penggelapan pajak dibandingkan mahasiswa dengan latar belakang pendidikan akuntansi. Menurut Danandjaja (2003), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas social maupun gender. Diskriminasi dalam bidang perpajakan menunjuk pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak. Semakin kecil diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, namun jika diskriminasi semakin besar maka perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai perilaku yang etis. Berdasarkan hal di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan manajemen mengenai penggelapan pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling dengan jenis judgement (pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan), yang kriteria respondennya, antara lain : 1) Mahasiswa akuntansi semester 5 keatas dan telah mengambil mata kuliah perpajakan dan hukum pajak, 2) Mahasiswa manajemen semester 5 keatas dan telah mengambil mata kuliah hukum pajak. Kriteria ini dipilih karena mahasiswa akuntansi dan manajemen yang telah menempuh mata kuliah hukum pajak dan perpajakan dipandang telah memiliki pengetahuan yang memadai terkait perpajakan.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner dengan penelitian langsung kepada kedua jurusan baik akuntansi maupun manajemen. Penyebaran kuesioner ini dilakukan secara langsung kepada responden dengan tujuan agar respon rate atau tingkat pengembalian kuesioner bias lebih tinggi. Skala pengukurannya menggunakan skala likert, dengan empat pilihan jawaban, yaitu 1. Tidak setuju (TS), 2. Ragu-ragu (RR), 3. Setuju (S), 4. Sangat setuju. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat orang lain). Dokumen sumber umumnya meliputi buku, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang telah dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah suatu data penelitian dengan menggunakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data uji t-test.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Umum Objek Penelitian*

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa akuntansi yang berada di Kota Ambon. Objek penelitian ini adalah mahasiswa program S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Jurusan Akuntansi dan Manajemen. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden. Kuesioner disebar kepada 100 responden. Dari 100 responden tersebut yang mengembalikan kuesioner sebanyak 100 responden, semua hasil kuesioner diolah. Tabel 1 adalah rangkuman dari uraian di atas yang menjelaskan tentang data sampel penelitian. Tabelnya sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Data Sampel Penelitian**

Data Sampel Penelitian	Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi		Mahasiswa S1 Jurusan Manajemen	
	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar dan kembali	50	100%	50	100%
Kuesioner yang diolah	50	100%	50	100%

Sumber : Data Primer Diolah

### *Analisis Deskriptif*

Berikut ini adalah hasil peringkat nilai rata-rata dari 15 pernyataan mulai dari yang terkecil hingga terbesar untuk dapat mengetahui manakah pernyataan yang menjadi perspektif bagi para responden yang dinilai paling sesuai dengan kondisi untuk melakukan penggelapan pajak atau menentang penggelapan pajak. Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa pernyataan yang paling disetujui atau dipandang sebagai pernyataan yang paling sesuai apabila terjadi tindakan penggelapan pajak adalah ketika sistem pajak berjalan tidak adil dan tidak efisien (dengan nilai rata-rata 2.541). Hal tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen di Fakultas Ekonomi Unpatti berpandangan bahwa apabila didalam sistem perpajakan memang tidak bisa diandalkan dalam mengatur perihal pemungutan pajak dan pengelolaannya maka wajar atau beretika jika masyarakat melakukan penggelapan pajak. Alasan lain responden beranggapan bahwa penggelapan pajak adalah etis apabila otoritas pajak yang ada kurang memadai, masyarakat tidak mampu untuk membayar pajak, dan jika sebagian besar porsi dari pajak yang dikumpulkan dipergunakan secara tidak merata, misalnya masih banyak daerah-daerah yang tidak merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak, hal ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan suatu negara pada masyarakatnya untuk memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemerdekaan bagi setiap warganya.

**Tabel 2**  
**Tabel Urutan Pernyataan**

Ranking	Pernyataan	Nilai rata-rata
1	Penggelapan pajak adalah etis, jika orang lain melakukannya.	2.089
2	Penggelapan pajak adalah etis, jika tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi.	2.120
3	Penggelapan pajak adalah etis, jika sebagian besar pajak digunakan untuk proyek yang tidak memberikan keuntungan bagi saya.	2.323
4	Penggelapan pajak adalah etis, bahkan, jika pengenaan tarif pajak tidak terlalu tinggi tetapi pemerintah tidak memberitahukan jenis dari pajak yang dikenakan (pajak atas apa).	2.231
5	Penggelapan pajak adalah etis, jika kemungkinan resiko untuk ditangkap/dipenjarakan atas tindakan tersebut kecil.	2.241
6	Penggelapan pajak adalah etis, jika saya tidak memiliki kemampuan untuk menghitung jumlah pajak yang disetorkan.	2.415
7	Penggelapan pajak adalah etis, jika pemerintah mendiskriminasi saya karena agama, ras, dan latar belakang etnis/budaya.	2.459
8	Penggelapan pajak adalah etis, jika pajak digunakan untuk mendukung sebuah perang yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan.	2.478
9	Penggelapan pajak adalah etis, jika penegak hukum yang ada belum memadai dalam menangani kasus pajak yang terjadi.	2.532
10	Penggelapan pajak adalah etis, jika secara signifikan sebagian besar pajak yang disetorkan dikorupsi oleh	2.532

Pada tabel 2 terlihat bahwa walaupun orang lain melakukan penggelapan pajak dan tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi (dengan rata-rata terkecil, yaitu 2.089 dan 2.120), bukanlah alasan bagi seseorang untuk membenarkan penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian McGee et. al., (2008) yang menyatakan bahwa penggelapan pajak yang dilakukan orang lain dan tarif pajak yang terlalu tinggi tidak dapat dijadikan alasan yang tepat bagi seseorang untuk menghindari membayar pajak.

Setiap pernyataan memiliki perbedaan jumlah rata-rata yang tidak terlalu jauh antara pernyataan satu dan lainnya dari ke 15 pernyataan yang ada, terbukti hanya selisih kecil saja, sehingga dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa tidak ada pernyataan yang mengungguli pernyataan lainnya secara signifikan dari para responden.

#### **Uji Validitas**

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Suatu pernyataan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0.05. Hasil uji validitas pada 15 pernyataan seperti pada tabel 3. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan berada pada tingkat signifikansi dibawah 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan yang berjumlah 100 tersebut adalah valid.

#### **Uji Realibilitas**

Hasil uji reliabilitas untuk kelimabelas pernyataan pada tabel 4 dapat dilihat hasil pengujian 15 pernyataan diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.966. Nilai tersebut lebih besar dari 0.60 ( $0.966 > 0.60$ ) maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap 15 pernyataan dikatakan reliabel.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas**

Hasil Uji Validitas Pernyataan	Sig.	Pearson Correlation	Keterangan
Pernyataan 1	0.000	0.620	Valid
Pernyataan 2	0.000	0.772	Valid
Pernyataan 3	0.000	0.735	Valid
Pernyataan 4	0.000	0.747	Valid
Pernyataan 5	0.000	0.678	Valid
Pernyataan 6	0.000	0.755	Valid
Pernyataan 7	0.000	0.676	Valid
Pernyataan 8	0.000	0.897	Valid
Pernyataan 9	0.000	0.455	Valid
Pernyataan 10	0.000	0.675	Valid
Pernyataan 11	0.000	0.674	Valid
Pernyataan 12	0.000	0.870	Valid
Pernyataan 13	0.000	0.678	Valid
Pernyataan 14	0.000	0.751	Valid
Pernyataan 15	0.000	0.890	Valid

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.966	.975	15

### Uji Normalitas Data

Uji normalitas data *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dilakukan untuk mengetahui jenis alat statistik yang akan digunakan untuk melakukan uji beda statistik parametris atau non parametris pada penelitian ini. Jika data terdistribusi normal maka alat uji beda yang digunakan adalah *Independent Sample T-test* dan jika ada data yang tidak terdistribusi dengan normal maka alat uji beda yang digunakan adalah *Mann-Whitney*.

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas			
Total			
N		100	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>		Mean	36.33
Std. Deviation		13.417	
Most Extreme Differences	Absolute	.075	
Positive		.075	
Negative		-.056	
Kolmogorov-Smirnov Z		.821	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.620	
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			

Dari hasil pengujian normalitas data yang menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diketahui bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal, data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila *Asymp.Sig.(2-tailed)* diatas 0.05. Pada penelitian ini nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* adalah 0.620 ( $0.620 > 0.05$ ), jadi alat uji beda yang digunakan adalah *Independent Sample T-test*.

**Analisis Data**

***Uji Beda Parametrik***

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji parametrik, yaitu *Independent Sample T-test* dengan menggunakan program SPSS 20.00. Uji beda ini digunakan untuk menguji perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak, dari hasil SPSS untuk pengujian *Independent Sample T-test* didapatkan output sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil SPSS (1) Group Statistics					
Group		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Total	1	50	33.69	13.144	1.580
	2	50	35.89	13.977	1.847

Dari hasil output SPSS yang pertama ini kita dapat melihat bahwa akumulasi rata-rata (*mean*) untuk mahasiswa akuntansi adalah 33.69 dengan jumlah 50 responden dan untuk mahasiswa manajemen adalah 35.89 dengan jumlah 50 responden. Berdasarkan hasil dari akumulasi rata-rata (*mean*) diatas maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa akuntansi lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa manajemen atau mahasiswa akuntansi lebih menentang penggelapan pajak dibandingkan dengan mahasiswa manajemen, walaupun perbedaanya tidak signifikan. Hal ini kemungkinan dikarenakan mahasiswa tidak terkait langsung dengan maalah perpajakan dalam proses pembelajaran berkelanjutan.

Mahasiswa akuntansi akuntansi memilih alasan dalam penggelapan pajak yang paling disetujui ialah pada pernyataan 7, yaitu penggelapan pajak dibenarkan atau dipandang etis ketika otoritas pajak yang ada kurang memadai (nilai rata-rata 2.657), sedangkan menurut pandangan mahasiswa manajemen yang lebih dipilih sebagai alasan untuk penggelapan pajak ialah pada pernyataan 12 (nilai rata-rata 2.843), yaitu penggelapan pajak adalah etis, jika seseorang tidak mampu untuk membayar pajak. Menurut mahasiswa akuntansi penggelapan pajak dianggap paling tidak etis atau tidak dapat dibenarkan jika hanya orang lain melakukannya (dengan nilai rata-rata terendah yaitu 2.114), sama halnya dengan mahasiswa manajemen yang menganggap penggelapan pajak paling tidak etis ketika kita melakukan penggelapan pajak jika orang lain juga melakukannya.

Perbedaan kedua pandangan tersebut masih belum bisa membuktikan bahwa ada perbedaan antara perspektif penggelapan pajak dari kedua sampel penelitian tersebut pertama dikarenakan perbedaan tersebut belum dilakukan uji statistik dan kedua karena antara kedua perbedaan tersebut hanya memiliki selisih yang sangat kecil sehingga belum diketahui apakah beda itu dapat dinyatakan sebagai beda perspektif yang sesungguhnya.

**Tabel 7**  
**Hasil SPSS (2)**

<i>Independent Samples Test</i>										
Levene's Test for Equality of Variances						t-test for Equality of Means				
F	Sig.	t	df			Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
Lower						Upper				
Total	Equal variances assumed	.562	.452	-.380	119	.687	-.988	2.479	-5.896	3.821
Equal variances not assumed		-.386	103.510	.684		-.987	2.601	-5.938		3.973

Sumber: Data Primer Diolah

Terdapat dua tahapan analisis yang harus dilakukan, pertama kita akan menguji dahulu asumsi apakah *variance* kedua sampel tersebut sama (*equal variance assumed*) atau memiliki *variance* yang tidak sama (*equal variance not assumed*) dengan melihat *Levene's Test*. Terlihat pada hasil *output* SPSS di atas dapat dilihat bahwa F hitung *Levene's Test* sebesar 0.562 dengan probabilitas 0.452, karena probabilitas lebih besar dari 0.05 maka kita dapat berasumsi bahwa kelompok mempunyai perbedaan sama atau mempunyai kesamaan *variance* (homogenitas) yaitu varians persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak sama dengan persepsi mahasiswa manajemen mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa thitung untuk persepsi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan *Equal Variance Assumed* adalah -0.380 dengan signifikansi 0.687. Karena signifikansi lebih besar dari 0.05 ( $0.687 > 0.05$ ) maka  $H_0$  ditolak atau tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen mengenai penggelapan pajak. Baik mahasiswa akuntansi maupun mahasiswa manajemen sama-sama menganggap bahwa penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang tidak etis untuk dilakukan. Penelitian ini mendukung penelitian McGee. Et. al., (2008) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai penggelapan pajak antara mahasiswa bisnis di Hongkong dan mahasiswa bisnis di Amerika Serikat, baik mahasiswa bisnis di Hongkong maupun di Amerika Serikat menganggap penggelapan pajak sebagai sesuatu yang tidak etis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hal ini sesuai dengan penelitian Ross dan McGee (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak membuat perbedaan dalam persepsi mengenai penggelapan pajak. Berbeda dengan McGee. et. al., (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam pandangan mengenai penggelapan pajak.

## SIMPULAN

Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak atau tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan analisis deskriptif tidak terdapat

perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen. Namun mahasiswa akuntansi lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa manajemen, walaupun perbedaan tersebut tidak signifikan. Implikasi dalam penelitian ini yaitu bahwa dari hasil jawaban yang diberikan oleh 100 responden yang menjadi sampel penelitian dapat diketahui bahwa, baik mahasiswa akuntansi maupun mahasiswa manajemen memiliki persepsi yang sama terhadap penggelapan pajak. Namun etis atau tidaknya persepsi responden disini hanya berfungsi sebagai penilai terhadap suatu perbuatan, yaitu apakah perbuatan itu dinilai baik, buruk, beretika atau tidak, selain itu jawaban yang diberikan responden mengindikasikan bahwa pada dasarnya penggelapan pajak merupakan suatu hal yang terkadang dapat dibenarkan atau tidak dibenarkan untuk dilakukan tergantung dari sikap dan sifat setiap individu serta kondisi yang melatarbelakanginya. Persepsi responden ini dapat dijadikan masukan yang penting bagi para instansi pajak terkait mengenai alasan atau faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak.

## REFERENSI

- Ghozali, Imam, 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ika, 2012. Kepala KPP Wonosari Raih Doktor Usai Teliti Penggelapan Pajak, Diakses melalui: <http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4561>, 15 November 2012
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Kirchler, Erich, Boris Maciejovsky & Friedrich Schneider, "Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences matter ?. SSRN.
- McGee, Robert W, dan Ranjana Gupta, 2008. *The Ethics of Tax Evasion: An Empirical Study of New Zealand Opinion*", Working Paper Florida International University Chapman Graduate School of Business. SSRN.
- Mughal, Muhammad Muazzam dan Muhammad Akram, 2012. *Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections from Pakistan. Journal of Economic and Behavioral Studies*. Volume 4.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Reskino. 2014. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Infestasi*. Vol.10 No 1.
- Tumewu, Wahyuni. 2018. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Vol IV No 1.